

BAB V

PENUTUP

1.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan bukti-bukti yang ditemukan dilapangan saat dilakukan penelitian, maka dapat diambil beberapa kesimpulan yaitu:

- 1) Sebagian besar peran Bendahara Pengeluaran dalam pelaksanaan APBD sudah sesuai dengan peraturan yang ada yaitu dalam hal pengelolaan dan penatausahaan uang dan surat berharga yang dikelolanya. Akan tetapi ada beberapa peran yang belum sesuai dengan peraturan yang ada, yaitu:
 - a) Dalam proses pencairan dana, dimana pembuatan SPD yang dalam peraturan dikatakan seharusnya dilakukan oleh Kuasa BUD namun didalam pelaksanaannya masih menjadi tugas dari Bendahara Pengeluaran dimasing-masing SKPD.
 - b) Dalam hal pertanggungjawaban, dimana Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dan Dinas Kesehatan Kab. Rokan Hulu masih sering tidak tepat waktu dalam menyampaikan pertanggungjawaban. Serta masih belum tertibnya Bendahara Pengeluaran di ke 4 SKPD yang teliti dalam membuat laporan penutupan kas sebagai salah satu dokumen pendukung dari SPJ yang dibuat.
2. Ada beberapa kendala yang dihadapi Bendahara Pengeluaran dalam pelaksanaan APBD di Kabupaten Rokan Hulu yaitu:

- a) Adanyanya perubahan sistem dan informasi dari pihak DPKA mengenai proses pencairan dana karena harus menyesuaikan dengan kondisi keuangan Pemerintah Daerah.
 - b) Adanya beberapa kegiatan yang didalam perencanaan anggaran kas belum waktunya untuk dilaksanakan, akan tetapi karena keadaan mendesak maka harus tetap dilakukan pencairannya.
 - c) Penerbitan SPD dan penyampain SPJ yang masih sering tidak tepat waktu serta belum optimalnya penerapan aplikasi SIMDA yang diterapkan oleh masing-masing SKPD juga menjadi kendala bagi Bendahara Pengeluaran dalam melaksanakan tugasnya.
3. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala yang ada, yaitu:
- a) Agar proses pencairan dan juga pertanggungjawaban dapat berjalan lancar maka diharapkan kepada pihak DPKA agar dapat segera memberikan informasi ataupun mengadakan sosialisasi atas setiap perubahan yang ada. Selain itu peran aktif dari masing-masing Bendahara Pengeluaran SKPD untuk mencari informasi mengenai perubahan yang ada juga dapat menunjang kelancaran dari pelaksanaan tugas Bendahara Pengeluaran.
 - b) Agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan sesuai dengan perencanaan anggaran kas yang telah dibuat maka diharapkan kepada PPTK agar dapat lebih cermat lagi dalam menyusun perencanaan kegiatan.
 - c) Penambahan personil, disiplin yang tinggi dari para pemegang jabatan serta pengoptimalan penggunaan aplikasi SIMDA dimasing-masing SKPD, baik optimalisasi pada SDM yang ada maupun pada sarana dan prasarana penunjang juga dapat menghasilkan laporan yang tepat waktu.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka ada beberapa saran yang dapat diberikan yaitu:

- 1) Diharapkan kepada para pemegang jabatan yang ada di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu agar dapat lebih tertib lagi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan peraturan yang ada.
- 2) Diharapkan kepada PPK-SKPD agar dapat lebih teliti dan cermat lagi pada saat melakukan verifikasi atas kelengkapan dokumen dan juga keabsahan dari SPJ yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu.
- 3) Kepada pihak DPKA agar dapat selalu memberikan informasi ataupun mengadakan sosialisasi baik itu mengenai aturan yang ada ataupun atas perubahan sistem yang ada kepada setiap SKPD sehingga masing-masing SKPD dapat segera menyesuaikan dengan perubahan yang ada.
- 4) Kepada Pengguna Anggaran agar dapat lebih memperhatikan lagi kualitas SDM yang ada khususnya untuk para Bendahara Pengeluaran dengan cara memberikan pelatihan ataupun sosialisasi serta melengkapi sarana dan prasarana penunjang yang ada, sehingga Bendahara Pengeluaran dapat melaksanakan pekerjaan secara lebih professional dan sesuai dengan aturan yang ada.